

# Menguatkan Indonesian AID untuk Diplomasi Pembangunan

**Luqman-nul Hakim**

Dibentuknya Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID pada Oktober 2019 merupakan capaian baru dalam politik diplomasi dan kerjasama pembangunan Indonesia. Dikategorikan sebagai *new emerging economies*, Indonesian AID merepresentasikan transformasi Indonesia dari negara penerima menjadi negara donor. Ia juga menjadi wadah tunggal (*single agency*) bagi pelaksanaan diplomasi dan kerjasama pembangunan internasional, yang diklaim para pendirinya sebagai bentuk ‘diplomasi tangan di atas’.

sektoral dan terfragmentasi menjadi lebih terkoordinasi dan efektif. *Kedua*, lembaga ini juga merupakan transformasi dari desain kerjasama pembangunan dan diplomasi dalam kerangka Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST). Potensi dan tantangan yang dihadirkan kedua konteks tersebut, yakni soal kelembagaan dan substansi kerjasama pembangunan, menjadi prasyarat penting untuk menguatkan Indonesian AID sebagai instrumen strategis bagi diplomasi dan kerjasama pembangunan Indonesia.

## Tantangan Kelembagaan dan Proyeksi Diplomasi Pembangunan

Diplomasi pembangunan internasional bukanlah sebuah praktik yang baru. Dengan agenda, desain kelembagaan, dan orientasi yang beragam, banyak negara telah mempraktekan dan mengembangkan model-model lembaga diplomasi pembangunan. Orientasinya pun berbeda-beda tergantung pada kepentingan masing-masing negara dan orientasi politik luar negerinya, dari yang bertujuan ideologis-politis, humanitarian, dan ekonomi. Secara umum, dinamika dan kekhasan orientasi diplomasi pembangunan ini berakar dari proyeksi geopolitik, ekspansi ekonomi, dan nilai-nilai dominan setiap negara.



Setidaknya terdapat dua konteks sentral terkait upaya penguatan Indonesian AID sebagai instrumen strategis diplomasi pembangunan Indonesia. *Pertama*, secara teknis ia merupakan upaya untuk menjadikan pelbagai kegiatan bantuan luar negeri yang sebelumnya bersifat

Dalam rangka penguatan Indonesian AID untuk diplomasi pembangunan, kompleksitas konteks di atas dapat dikerucutkan menjadi dua isu penting yang saling terkait: (1) desain kelembagaan seperti apa yang ideal untuk menopang fungsi strategis diplomasi pembangunan dan (2) substansi dan proyeksi orientasi bagaimana yang relevan dengan Indonesia.

Meskipun pada awalnya Indonesian AID diharapkan menjadi wadah tunggal yang komprehensif untuk koordinasi dan implementasi diplomasi pembangunan, pada akhirnya lembaga ini ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang diatur melalui PP No. 48 tahun 2018 yang direvisi melalui PP No. 57 tahun 2019. Bagi sebagian pihak, bentuk kelembagaan ini dinilai kurang ideal untuk menjadikan Indonesian AID sebagai fondasi untuk diplomasi pembangunan (Wawancara Bappenas, 15 September 2021; LDKPI, 19 Agustus 2021). Konsensus kelembagaan ini juga sangat dipengaruhi oleh situasi politik saat ia dibentuk. Meskipun rencana menuju *single agency* telah dicanangkan dalam RPJMN 2014-2019, kepemimpinan Presiden Jokowi Jilid I yang menghendaki perampingan lembaga-lembaga pemerintahan membuat para perumusnya harus sementara puas dengan kerangka regulasi dan kelembagaan yang ada (FGD Jakarta, 29 Oktober 2021).

Berdasarkan kajian atas desain dan tata kelola Indonesian AID, setidaknya terdapat tiga tantangan pokok dalam menjadikannya sebagai lembaga yang solid untuk diplomasi pembangunan.

*Pertama*, meskipun sebetulnya Indonesian AID dikonstruksi sebagai lembaga satu pintu untuk diplomasi pembangunan Indonesia, melalui PP No. 57 tahun 2019 cakupan dan fungsinya ditentukan untuk pengelolaan dana dan hibah luar negeri. Padahal, tentu saja, bentuk diplomasi pembangunan tidak

hanya terbatas pada hibah luar negeri. Kerangka kelembagaan BLU Indonesian AID juga ambigu. Pada satu sisi, ia diharapkan dapat menghasilkan keuntungan (*profit*) dengan proyeksi agar bantuan-bantuan luar negeri tidak lagi membebani APBN dan lebih fleksibel dalam pengelolaan dana. Pada sisi lain, ia diberi peran terbatas seperti “kasir” yang dituntut untuk menjaga efisiensi pembelanjaan baik dalam skema Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH) maupun insidental. Indonesian AID tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan merumuskan nilai strategis program-program diplomasi pembangunan.

*Kedua*, keberlanjutan dan dukungan politik bagi kelembagaan Indonesian AID sangat penting untuk membangun fondasi diplomasi pembangunan yang memiliki legitimasi di dalam negeri. Diplomasi pembangunan semestinya bukan hanya bersifat jangka pendek dan berorientasi kegiatan, namun harus berbasis dampak (*impact oriented*). Hal ini membutuhkan pondasi kelembagaan dan dukungan politik yang luas untuk menjamin keberlanjutan program ini. Karena Indonesian AID statusnya adalah BLU di bawah Kementerian Keuangan, ia berkoordinasi dengan Komisi XI DPR (bidang keuangan dan perbankan) bukan dengan Komisi I yang secara substansi dan politik membidangi isu politik luar negeri. Penguatan basis regulasi ke dalam bentuk Undang-Undang, yang mengikat pemerintah dan DPR, dapat menjadi opsi untuk penguatan kelembagaan Indonesian AID sekaligus mengintegrasikan logika teknokratis dan logika politik representasi dalam formulasi dan implementasi diplomasi pembangunan.

*Ketiga*, meskipun Indonesian AID menjadi wadah koordinasi untuk formulasi dan implementasi diplomasi pembangunan yang diarahkan oleh empat kementerian (yakni Kementerian Luar Negeri,

BAPPENAS, Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara), desain besar proyeksi diplomasi pembangunan Indonesia belum dirumuskan secara padu. Sebelum Indonesian AID, pada 2010 Indonesia telah membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (Tim Kornas KSST) untuk mengkoordinasikan program-program kerjasama kementerian yang terfragmentasi dan bersifat *ad hoc*. Indonesian AID diharapkan menjadi kerangka kebijakan satu pintu untuk diplomasi pembangunan agar sesuai dengan kepentingan nasional dan relevan dengan perkembangan regional dan global (Tim Kornas KSST, 2017). Dua tahun sejak pendirian Indonesian AID, proses integrasi agenda KSST masih belum berjalan lancar (FGD Jakarta, 29 Oktober 2021).



**Gambar.** Peluncuran laporan tahunan KSST 2016. (Sumber: infopublik.id)

Dari sisi tata kelola kelembagaan, problem integrasi ini dipengaruhi beberapa faktor. *Pertama*, meskipun empat kementerian sudah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk merumuskan agenda Indonesian AID, ternyata belum ada mekanisme yang baku tentang pengambilan keputusan dan penentuan prioritas. *Kedua*, kesulitan Indonesian AID untuk mengkoordinasi Pokja. *Ketiga*, tidak dilibatkannya Indonesian AID dalam pembahasan substantif di Pokja karena ia dianggap sebagai pelaksana (FGD Jakarta, 29 Oktober 2021).

## Rekomendasi

Sebagai sebuah *single agency* untuk diplomasi pembangunan, pembentukan *Indonesian AID* merupakan capaian penting dalam trajektori politik luar negeri Indonesia. Namun demikian, untuk menjadikannya sebagai fondasi bagi penguatan diplomasi pembangunan Indonesia di masa depan terdapat sejumlah tantangan kelembagaan yang perlu terus dievaluasi. Tantangan-tantangan tersebut sebetulnya wajar karena memang lembaga ini masih sangat baru dan perlu mencari bentuk yang paling ideal.

Beberapa usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan tata kelola Indonesian AID dirumuskan sebagai berikut.

- **Sentralisasi dan integrasi program lintas kementerian dalam Indonesian AID perlu diikuti dengan integrasi substansi dan proyeksi diplomasi pembangunan yang bersifat jangka panjang.**

Tanpa adanya integrasi substansi dan orientasi diplomasi pembangunan jangka panjang maka upaya membentuk *single agency* akan mudah terjebak pada birokratisasi baru yang memisahkan nilai dan substansi diplomasi pembangunan pada satu sisi dan teknokrasi pengelolaan hibah luar negeri pada sisi yang lain. Kondisi ini setidaknya berakibat pada dua hal: (1) sulitnya mengukur dampak diplomasi pembangunan karena

Indonesian AID berorientasi terbatas pada kegiatan dan (2) karena terbatasnya cakupan dan wewenang pada pengelolaan dana dan implementasi hibah luar negeri, transformasi Indonesian AID sebagai pilar lembaga yang kuat untuk diplomasi pembangunan—yang mengandaikan adanya kepaduan desain kelembagaan dan proyeksi diplomasi Indonesia—menjadi sulit dilakukan.

- **Untuk menjamin keberlanjutan dan memperkuat legitimasinya, dukungan politik bagi kelembagaan Indonesian AID perlu diperkuat.**

Sebagai program jangka panjang, diplomasi pembangunan sudah semestinya melibatkan pelbagai pihak dan menjadi agenda politik bersama—tidak semata-mata menjadi agenda pemerintah atau rezim yang berkuasa. Penguatan kerangka regulasi dari Peraturan Pemerintah ke Undang-Undang, yang mengikat pemerintah dan DPR, bisa menjadi salah satu opsi untuk memastikan keberlanjutan Indonesian AID. Langkah ini juga penting sebagai upaya untuk membangun legitimasi politik Indonesian AID, yang memadukan logika teknokrasi dan logika representasi politik dalam merumuskan dan melaksanakan diplomasi pembangunan jangka panjang.

- **Desain dan proyeksi diplomasi pembangunan Indonesia perlu dirumuskan secara padu dan kelembagaan Indonesia AID harus dirancang sebagai bagian integral di dalamnya.**

Meskipun secara historis Indonesian AID merupakan transformasi dari visi KSST untuk membangun *single agency*, hingga saat ini proses integrasi dua tata kelola ini masih belum berjalan dengan baik. Di samping itu, fokus dan orientasi diplomasi pembangunan juga perlu terus dikaji dan dirumuskan secara bersama. Misalnya, apakah Indonesian AID akan berfokus pada program diplomasi pembangunan dalam kerangka Selatan-Selatan yang berbasis solidaritas atau akan berorientasi lebih pragmatis sebagai bentuk diplomasi ekonomi yang berfokus pada pembukaan akses pasar dan investasi. Tanpa ada *roadmap* bersama dan penyesuaian desain kelembagaannya, diplomasi pembangunan Indonesia akan bersifat sporadik dan tidak programatik. Sementara itu, Indonesian AID hanya menjadi lembaga sampiran yang punya peran terbatas dalam mengintegrasikan upaya-upaya diplomasi pembangunan Indonesia yang sebelumnya dianggap terfragmentasi dan *ad hoc*.



## Daftar Pustaka

- Mas'ood, M. (2016). "Urgency" Membentuk "Agency": Catatan tentang "Institutional Set-Up Single Agency KSST Indonesia". Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Gadjah Mada.
- Tim Kornas KSS dan GIZ. (2017). Pembentukan "Single Agency" Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia. Diakses di [https://ktln.setneg.go.id/pdf/publikasi\\_01\\_12072018.pdf](https://ktln.setneg.go.id/pdf/publikasi_01_12072018.pdf) pada 2 Oktober 2021.